

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang di dalamnya memberikan pembinaan bagi narapidana dengan tujuan selain sebagai suatu perwujudan dari Pasal 10 KUHP yaitu tentang jenis-jenis pidana, lebih khususnya pidana penjara namun juga untuk mengadakan perubahan-perubahan kepada kehidupan yang lebih baik lagi dengan diadakannya pembinaan, serta pengayoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu “istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditetapkan dalam tata budaya indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia”. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>78</sup>

---

<sup>7</sup> Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*. <http://online-hukum.blogspot.com>. Akses 1 januari 2018

Jadi lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang dikhususkan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau terpidana. Pembinaan narapidana yang dimaksud bukan hanya pembinaan yang berpau pada prinsip-prinsip pembinaan melainkan termasuk bagaimanakah tata cara membina yang dilakukan pada kenyataannya serta hasil yang didapatkan dari pembinaan itu. Apakah narapidana menjadi seseorang yang lebih baik karena proses pembinaan atau bahkan binaan yang diberikan sama sekali tidak mempengaruhi narapidana tersebut.

## **2. Peran Penting Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P10.13/3/1 yang tertanggal 8 Februari 1985, menentukan mengenai suatu konsepsi tentang pemasyakakatan yaitu sebagai berikut :

Pemasyarakatan adalah suatu proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Sejauh itu nerapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan)<sup>9</sup>

Secara singkat menurut hemat penulis, peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana sangatlah penting.

---

<sup>9</sup> Djisman Samosir, 2013. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan. Nuansa Aulia. Bandung. Hal. 30.

Lembaga pemasyarakatan dibentuk untuk menghilangkan definisi buruk tentang penjara yang dulunya dikenal kejam karena memberikan penyiksaan kepada narapidana. Memang lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari pidana penjara. Namun narapidana memiliki hak sebagai seorang manusia yang hak nya juga dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan narapidana maupun mantan narapidana sebagai orang yang tercela. Mereka hanyalah seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat.

Di lembaga pemasyarakatan, narapidana juga dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik. Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya jika mereka dikembalikan lagi kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menerimanya karena bimbingan atau pembinaan yang sudah diberikan di lembaga pemasyarakatan menyebabkan narapidana menjadi lebih baik lagi sehingga enggan atau tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

### **3. Tujuan Dari Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dari didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah tidak lain untuk membina narapidana. Dalam perkembangannya pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan tujuan pemidanaan tujuan dari pembinaan dan tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan dapat ditemukan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 : Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup seara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 : Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi seara sehat dengan masyarakat, sehinga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sudah jelas tercantum di dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan diatas yang tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk kebaikan narapidana atau warga binaan serta masyarakat.

#### **4. Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pola pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- 3) Pendidikan dan Pembimbingan
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 5) Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
- 7) Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan ara kunjungan, hiburan kedalam lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Jadi yang dapat memberikan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan hanya pembina pemasyarakatan saja. Pembinaan dan bimbingan yang

dilakukan pembinaan pemasyarakatan dibedakan menjadi beberapa tahap yaitu : admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

- 1) Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada di lembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahap ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING)
- 2) Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai ½ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
- 3) Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai ½ (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (keerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).
- 4) Tahap intergrasi, dilaksanakan setelah wargabinaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : uti biasa, uti menjelang bebas, dan embebasan bersyarat.<sup>10</sup>

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dibagi kedalam dua bidang yakni:

---

<sup>10</sup> Serikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal. 38.

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama;
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual;
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum;
- e. Pembinaan mengintergrasikan diri dengan masyarakat;

2) Pembinaan Kemandirian

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pidana penjara tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana saja, melainkan juga memperhatikan masa depan mereka bagaimana nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. hal tersebut dapat dilihat dari pola pembinaan narapidana sebagaimana peneliti uraikan diatas yang juga mencakup beberapa dengan sidat pribadi dan kemandirian atau keterampilan.

## **B. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pelaksana Pemidanaan**

### **1. Dasar Pemidanaan**

Pokok dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis sebagaimana yang peneliti kutip dari pendapatnya Moelyatno dalam bukunya yaitu istilah perbuatan pidana sama pengertiannya dengan istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris. Sebab *criminal act* juga mengandung arti kelakuan + akibat. Selain itu *criminal act* juga dipisahkan dari *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Dasar tersebut adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seorang atas perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun dasar yang dipakai dalam pelaksanaan pemidanaan adalah dasar hukum yang mengatur secara langsung asas, tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan efek jera, tetapi merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

### **2. Tujuan Pemidanaan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga dalam sub sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)<sup>11</sup>. Dimana salah satu sarannya adalah untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan

---

<sup>11</sup> Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 69



menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Didalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah tercantum tujuan, fungsi dan asas dari sistem pemasyarakatan. Tujuan sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 2 UU No.12 tahun 1995, yaitu pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara umum tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Pencegahan (umum dan khusus)

Pencegahan merupakan salah satu tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri agar si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan yang telah mereka lakukan. Pencegahan ini memiliki makna ganda, yaitu yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Maksud dari pencegahan individual atau pencegahan khusus adalah bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat membawa penderitaan baginya. Dengan

penderitaan di dalam penjara tersebutlah diharapkan bisa meyakinkan untuk tidak melakukan kejahatan lagi setelah bebas dari penjara.

Sedangkan pencegahan umum memiliki arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain yang mengetahui hal tersebut tentunya merasa enggan untuk melakukan suatu kejahatan, dan dengan hal tersebut diharapkan orang-orang lain memilih untuk tidak melakukan kejahatan karena takut dipenjara.

## 2) Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah melakukan kerusakan dan membahayakan orang lain wajib menderita sama dengan yang ditimpakan kepada orang lain. Di masyarakat primitif, tujuan pembedaan lebih menonjolkan aspek pembalasan daripada yang lain. Hal ini merupakan suatu akibat dari sesuatu yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan contoh suatu perbuatan kepala suku yang dilakukan kepada suku lainnya mengakibatkan tuntutan pembalasan dari suku lain tersebut. Kebanyakan orang merasa gusar serta geram jika mendengar atau mengetahui tentang tindak kejahatan yang mengerikan misalnya pembunuhan dan mutilasi. Penjahat yang melanggar aturan moral haruslah dihukum untuk memulihkan keseimbangan moral tersebut.

Maksud dari pembalasan disini adalah membalas suatu kejahatan dengan pidana yang dimaksudkan agar terwujudnya keadilan karena memang harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan.

### 3) Rehabilitasi

Setiap hukuman yang dijatuhkan memiliki fungsi untuk mengobati atau merehabilitasi apa dan siapa saja yang sudah menjadi korban dari tindak kejahatan. Dimana rehabilitasi sendiri merupakan langkah penyembuhan yang menekankan perlakuan untuk memperbaiki tingkah laku pelanggar hukum.

Pemidanaan diharuskan dapat mengubah pandangan dan sikap para pelanggar hukum sehingga tidak akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah sebagai wahana untuk mendidik dan membina warga binaan agar nantinya setelah mereka keluar dari penjara, mereka dapat hidup bersama dengan masyarakat tanpa mengulangi perbuatan yang telah mereka lakukan.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang sering dijatuhkan pada pelanggar hukum, pidana penjara dimaksudkan untuk menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Hilangnya kemerdekaan itu juga bisa artikan dengan ditentukannya atau dibatasinya ruang gerak si pelanggar hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal ada 2 (dua) jenis pidana yang telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut dibagi lagi menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahannya meliputi pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Yang membedakan pidana pokok dengan pidana tambahan adalah kalau pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, terkecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah dimana pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan. Selanjutnya pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok sehingga sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif yang berarti pidana dapat dijatuhkan maupun tidak (pengecualian untuk pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu adalah tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

#### **4. Narapidana**

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat ataupun hukum Negara tentunya

memiliki konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum adat sanksi yang dijatuhkan biasanya adalah sanksi dalam bentuk ganti kerugian sedangkan dalam hukum Negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah melalui proses peradilan dan dikenakan putusan dari hakim.

Dimasyarakat sudah berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana, yang secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda dan sistem pemasyarakatan, sehingga pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik<sup>12</sup>

### **C. Peredaran Narkotika Sebagai Tindak Pidana**

#### **1. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan juga dalam istilah lain juga dikenal dengan sebutan delik sedangkan di dalam undang-undang istilah

---

<sup>12</sup> Poernomo dalam Taufik Hidayat, 2011. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Hal 17

tersebut dikenal dengan tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Jadi tindak pidana adalah sebuah tindakan pada waktu, tempat dan keadaan tertentu yang melanggar suatu aturan, atau yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Selanjutnya yang dimaksud tindak pidana narkoba adalah suatu tindakan melanggar aturan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam kaitannya dengan kegiatan pemakaian, peredaran atau perdagangan penggunaan narkoba dan psikotropika atau prekursor narkoba.

## **2. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan**

Peredaran narkoba sebagaimana tertera dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara singkat jika kita membaca isi dari pasal tersebut maka yang terbayangkan adalah bahwa peredaran narkoba legal baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan

---

<sup>13</sup> Moeljatno dalam Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Education Offset Yogyakarta. Yogyakarta. Hal. 39.

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian disebutkan lagi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Maka berdasarkan kedua pasal sebagaimana disebutkan diatas yaitu pasal 35 dan 38 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat peneliti simpulkan bahwa : 1) kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal; 2) kegiatan penyaluran atau penyerahan yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal; 3) setiap peredaran narkotika yang dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah peredaran narkotika yang legal; 4) peredaran narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah baik itu untuk kegiatan yang telah diantumkan dalam undang-undang adalah peredaran narkotika yang ilegal.

Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan adalah segala macam bentuk peredaran yang ilegal, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam lembaga pemasyarakatan maupun para narapidana. Namun disini peneliti memberikan batasan penelitian, yaitu peredaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah peredaran narkotika dengan cara ilegal yang ada kaitannya narapidana non-narapidana maupun antara sesama narapidana.

### **3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Dasar Larangan Peredaran Narkotika**

Maraknya penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini menapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kejahatan narkotika tidak dapat lagi dipandang sebagai kejahatan yang biasa melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan regulasi peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.

Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika berperan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan menegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, bukan hanya itu di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai prekursor narkotika dikarenakan prekursor narkotika juga merupakan suatu zat yang berbahaya karena merupakan bahan kimia atau bahan utama yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

### **D. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dimana didalam pertimbangan peraturan tersebut ada karena untuk menjamin



terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana serta pelayanan tahanan bahwa perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Peraturan atau tata tertib yang diberlakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara apabila dipatuhi akan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terdiri dari 5 (lima) dan 18 pasal. Bab-bab nya terdiri Bab I Ketentuan umum terdiri dari 2 (dua) pasal, Bab II Kewajiban dan Larangan yang terdiri dari 5 (lima) pasal, Bab III Jenis Hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang terdiri dari 4 (empat) pasal, Bab IV tentang penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari 6 (enam) pasal, Bab V tentang ketentuan penutup yang terdiri dari 1 (satu) pasal.

#### **E. Teori Hukum**

Peneliti akan menjabarkan 3 (tiga) teori hukum yaitu teori efektifitas hukum, teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif yang nantinya dalam pembahasan teori-teori tersebut akan peneliti komparasikan dengan data-data yang didapat dalam penelitian ini.

## 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>14</sup>

Teori efektifitas hukum sendiri dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski sendiri menyajikan teori efektifitas pengendalian sosial atau hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi :

- (1) Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- (2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- (3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan 3 (tiga) masalah yang menjadi objek penelitian tersebut maka disini peneliti menyimpulkan bahwa Bronislaw Malinowski menganalisis efektifitas hukum dalam kehidupan masyarakat yang dibagi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Dikatakan masyarakat modern karena

---

<sup>14</sup> Barda Nawawie Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya. Bandung. Hal. 67.

<sup>15</sup> H.Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 305

perekonomiannya berdasar pada pasar secara luas, spesialisasi dibidang industri dan juga pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern hukum dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan ditegakkan oleh kepolisian, sedangkan dalam masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sangat sederhana serta tidak mengenal alat-alat atau tingkatan kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan sebuah pendapat bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, dalam artian menapai segala sesuatu yang sudah di *planning*-kan nya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya.

Berbicara tentang efektifitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja hukum itu dalam mengatur serta memaksa masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadapnya. Hukum dikatakan dapat efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang. Maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:

- (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

- (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian menjadi suatu tolak ukur apakah tujuan yang telah direncanakan tercapai, dan apakah hukum itu sendiri dapat dikatakan efektif atau tidak. Faktor tersebut diatas lah yang nantinya juga akan menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam melakukan penelitian di Lapas Lowokwaru Kota Malang terkait penerapan pasal 4 poin (g) PERMENKUMHAM nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Apakah peraturan tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono yaitu disebut sebagai faktor hukumnya sendiri (Undang-undang) yang kemudian jika dihubungkan dengan keempat faktor lainnya akan menciptakan sebuah keefektifan hukum dalam lingkup Lapas tersebut.

## **2. Teori Hukum Pembangunan**

Sebelum menjelaskan arti dari teori hukum pembangunan disini peneliti mengutip pendapat dari Mohtar Kusumaatmadja dalam bukunya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa :

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 8.

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mrngingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, akan tetapi. Masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya kemudian pandangan oleh Kusumaatmadja tersebut diberinama menjadi Teori Hukum Pembangunan dimana ada 2 aspek yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu :

- (1) Terdapat asumsi bahwa sebenarnya hukum tidak dapat berperan sebagaimana mestinya bahkan menghambat perubahan masyarakat,
- (2) Realita di dalam masyarakat Indonesia sendiri telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Tujuan pokok hukum oleh Kusumaatmadja bila direduksi pada satu hal saja adalah dapat disimpulkan sebagai suatu ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan

---

<sup>17</sup> Yuoku Surinda, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*. <https://yuokysurinda.wordpress.com>. Akses 18 November 2017.

lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.

### 3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif juga dapat diartikan sebagai hukum yang berubah secara cepat serta melakukan berbagai terobosan.

Prof, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Hal ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.<sup>18</sup>

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo tersebut keadilan tidak bisa seara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Oleh karena itu konsep hukum progresif ini adalah hukum yang tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

---

<sup>18</sup>Suriman, 2010. *Memahami Hukum Progresif Prof.Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Disertasi. Universitas Diponogoro Semarang. Hal. 11.

Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

